

BANYAK GEDUNG TINGGI Butuh Mobil Pemadam Kebakaran Khusus

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo belum memiliki mobil pemadam kebakaran khusus yang mampu menjangkau gedung tinggi. Kebutuhan tersebut mendesak mengingat kondisi di Sukoharjo sekarang banyak bermunculan gedung bertingkat tinggi. Mobil pemadam kebakaran yang sudah tersedia hanya mampu menjangkau bangunan gedung berlantai dua.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Heru Indarjo, Sabtu (14/11) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sekarang baru memiliki tujuh unit mobil pemadam kebakaran. Keberadaan armada tersebut sangat penting mengingat kasus kebakaran di Sukoharjo sangat tinggi.

Kebutuhan mobil pemadam kebakaran masih kurang mengingat belum ada yang mampu menjangkau gedung tinggi. Padahal kondisi di Sukoharjo sekarang banyak bermunculan gedung bertingkat tinggi. Salah satunya Gedung Menara Wijaya milik Pemkab Sukoharjo tempat kantor pemerintahan berlantai sepuluh.

Bangunan tinggi lainnya juga banyak bermunculan milik swasta baik dalam bentuk hotel, mal dan rumah sakit tersebar disejumlah wilayah. Keberadaan bangunan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan peralatan penanganan kebakaran.

"Kami masih membutuhkan mobil pemadam kebakaran khusus yang mampu menjangkau gedung tinggi. Sebab di Sukoharjo sudah banyak bermunculan gedung bertingkat tinggi hingga sepuluh lantai. Padahal mobil pemadam kebakaran yang dimiliki sekarang hanya mampu menjangkau bangunan berlantai dua," ujarnya.

Satpol PP Sukoharjo sudah menyampaikan kebutuhan mobil pemadam kebakaran tersebut ke Pemkab Sukoharjo. Namun karena kondisi sekarang masih pandemi virus Korona dan besarnya kebutuhan anggaran pembelian mobil pemadam kebakaran tersebut maka rencana pengadaan ditunda sementara waktu.

"Kami berencana mengajukan pembelian mobil pemadam kebakaran yang mampu menjangkau bangunan tinggi pada tahun 2022 mendatang," lanjutnya.

Heru menambahkan, karena belum memiliki peralatan yang dibutuhkan tersebut maka penanganan kebakaran masih mengandalkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Selain itu juga meminta pada pengelola gedung bertingkat tinggi untuk melengkapi sistem pengamanan penanganan kebakaran dengan menyediakan hydrant dan alat pemadam kebakaran. **(Mam)-d**

DPT Pilkada 2020 Ditetapkan 660.487 Pemilih

SUKOHARJO (KR) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 sebanyak 660.487 pemilih. Data tersebut sudah diumumkan ke masyarakat. Meski begitu bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdata DPT masih bisa menggunakan hak pilih cukup membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai alamat masing-masing.

Anggota KPU Sukoharjo, Cecep Choirul Sholeh, Sabtu (14/11) mengatakan, KPU Sukoharjo sudah menetapkan DPT Pilkada 2020 beberapa waktu lalu. Usai penetapan langsung ditindaklanjuti dengan pengumuman dan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar setiap pemilih sudah mengetahui terdata dan bisa menggunakan hak pilih saat pencoblosan digelar 9 Desember mendatang.

DPT Pilkada 2020 yang sudah ditetapkan KPU Sukoharjo diketahui sebanyak 660.487 pemilih tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, pemilih laki-laki 326.627 orang dan pemilih perempuan 333.860.

"DPT Pilkada 2020 memang sudah ditetapkan, tapi apabila ada pemilih yang sudah memenuhi syarat dan belum masuk DPT masih bisa menggunakan hak pilih. Cukup membawa e-KTP ke TPS sesuai alamat masing-masing. Nanti panitia akan melayani penggunaan hak pilih tersebut," ujarnya.

Cecep mengatakan, kemungkinan pemilih yang sudah memenuhi syarat belum terdata DPT masih bisa terjadi. Karena itu kelengkapan diberikan KPU Sukoharjo agar pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilih.

Pemilih yang kemungkinan belum masuk DPT dikatakan Cecep seperti warga dari luar kota yang pindah masuk ke Sukoharjo, peralihan status pensiunan TNI/Polri dan pemilih pemula. Sebab kondisi sekarang masih ada beberapa waktu ke depan hingga pencoblosan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Misal pada posisi sekarang DPT sudah ditetapkan dan ada pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun saat tanggal 8 Desember atau mungkin 9 Desember atau bersamaan dengan pencoblosan. Maka bisa menggunakan hak pilih cukup membawa e-KTP ke TPS," lanjutnya.

KPU Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pencetakan e-KTP. Sebab e-KTP merupakan syarat wajib yang harus dibawa pemilih saat menggunakan hak pilih. **(Mam)-d**

BOROBUDUR MARATHON POWERED BY BANK JATENG 2020

Mengusung Semangat Kembali ke Magelang

MAGELANG (KR) - Borobudur Marathon 2020 powered by Bank Jateng yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Harian Kompas, digelar Minggu (15/11) pagi ini.

Borobudur Marathon 2020 Powered by Bank Jateng ini mengusung semangat Kembali Ke Magelang, yang membawa pesan untuk terus menjaga eksistensi Magelang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Mungkin saat ini belum bisa bertemu di Magelang, namun ketika saatnya nanti akan bisa #KembaliKeMagelang dan berlari bersama.

Borobudur Marathon 2020 Powered by Bank Jateng diselenggarakan dengan konsep yang berbeda dari biasanya, yaitu kombinasi antara virtual run dan elite race. Keputusan diselenggarakannya Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng dengan format ini merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan.

Beberapa persiapan sudah dilakukan, khususnya untuk elite race di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), Sabtu (14/11) kemarin. Dalam acara konferensi pers di Hotel Plataran Heritage Borobudur, Sabtu kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara virtual resmi membuka Borobudur Marathon 2020 Powered by Bank Jateng yang diikuti 26 pelari elite dan 9.090 pelari virtual. **(Tha)-d**

BPUM di DIY Secara Umum Tepat Sasaran

YOGYA (KR) - Hasil uji petik terhadap penerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Yogyakarta menunjukkan bahwa secara umum, bantuan tepat sasaran. Bantuan digunakan oleh penerima untuk kegiatan produktif, seperti jasa bordir, jasa bengkel dan pembuatan kue, dari dana bantuan yang didapat digunakan untuk membeli peralatan atau menambah modal untuk meningkatkan produksi.

Hal itu terungkap dari kunjungan kerja Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto, sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Deputy Bidang Pembiayaan dalam program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro, di DIY, tanggal 9-10 November 2020. Mayoritas penerima Banpres mengaku sangat terbantu oleh dana bantuan dari pemerintah tersebut.

Rulli menyatakan, beberapa penerima Banpres di Bantul dan Sleman yang langsung terhubung secara online dapat lebih survive. Bahkan ada di antara mereka yang di awal pandemi omzetnya sempat menurun, kemudian secara perlahan meningkat lagi.

"Dari monitoring dan evaluasi dua hari ini banyak pelaku UMKM yang ulet dan mereka mudah mengalihkan bisnisnya dari offline ke online, menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka inilah yang bisa survive menghadapi setiap kesulitan," tutur Rulli.

Terkait Monev dua hari di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Bantul, Luhur menyatakan hal ini perlu terus dilakukan agar tujuan pelaksanaan dan penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro tepat sasaran, cepat, transparan dan akuntabel.

Di samping itu hasil Monev dapat dipergunakan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan maupun perbaikan sistem pendataan. "Kita harus berhati-hati supaya tidak ada kesalahan data. Untuk itu Tim Pokja khususnya dalam rangka sosialisasi harus bisa meyakinkan kepada masyarakat, agar antara pemerintah dan bank penyalur tidak dibenturkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Luhur.

Luhur memaklumi dengan waktu yang singkat dan cepat, banyak hal dalam pelaksanaan di lapang-



KR-Widyo Suprayogi
Kunjungan tim Monev Kementerian Koperasi dan UMKM ke penerima BPUM di DIY.

an belum tersosialisasi dengan maksimal. Untuk itu, monitoring dan evaluasi ini penting agar pelaksanaan dan penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro ini lebih efektif. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan untuk meminimalisasi kesalahan administrasi sekaligus akuntabilitasnya tetap terjaga.

"Kejujuran pelaku usaha mikro yang terdampak dalam pendaftaran program Banpres dan ketelitian lembaga pengusul dalam mengusulkan calon penerima Banpres merupakan faktor penentu keberhasilan program Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro," tegas Luhur.

Karena dalam penyaluran Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro ini dituntut cepat dan tepat, bermanfaat bagi pelakunya. "Harus dibangun sistem pendataan yang baik, diharapkan sistem baru tersebut tahun ini bisa selesai, supaya mudah dalam melakukan penyaluran dan tepat sasaran," kata Luhur.

Luhur juga mengapresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY yang telah mengusulkan calon penerima Banpres Produktif Untuk Usaha Mikro. **(Ogi)-d**

Lapak Batu Akik Mulai Menggeliat

SLEMAN (KR) - banyak. Penggemar batu akik mulai menggeliat bangkit. Salah satu parameternya dari animo pengunjung lapak kaki lima pedagang dan perajin batu akik di beberapa sentra pedagang batu akik. Salah satunya di lapak kaki lima selatan Pasar Prambanan Sleman. Dari hari ke hari pengunjung semakin



KR-Daryanto
Salah satu lapak batu akik di Pasar Prambanan.

Margono sendiri. Kemudian ada pedagang-pedagang lain ikut menggelar dagangan di sini," kata Dodo, pedagang sekaligus perajin batu akik.

Dodo sendiri mulai menggelar dagangan dan buka workshop kerajinan batu akik di lokasi tersebut, lima tahun silam. Dulu dia bekerja sebagai tukang kayu di sebuah perusahaan mebel. Karena merasa tertarik menekuni kerajinan batu akik, dia pun banting stir.

Dia buka lapak bersama istri. Dodo mengerjakan pesanan batu konsumen, istrinya melayani pelanggan yang datang mencari batu, mencari cincin, mengubah ukuran cincin, atau bila ada yang ingin memoles batu agar mengkilap.

Selain Dodo dan Mbah Margono, ada lebih dari li-

ma lapak lain yang juga menggelar dagangan. Mulai dari akik berbahan batu alam, akik perhiasan berupa batu imitasi, sampai batu mulia. Ada juga lapak yang khusus menjual kerajinan kayu langka bertuah.

Beberapa batu mulia sekelas safir dan rubi sering ditemui di lapak para pedagang. Tentang harga, bila dibanding dengan lapak-lapak di sentra pedagang akik lokasi lain, harga di Prambanan bisa dibilang paling bersahabat. Harga ring cincin, misalnya. Mulai dari Rp 20 ribu sampai Rp 60 ribu. "Tergantung bahannya," kata Dodo.

Untuk jasa membuat mata cincin dari bongkahan batu, Dodo mengutip uang jasa Rp 20 ribu per biji mata cincin. Terkadang satu batu bisa dipecah menjadi belasan butir mata cincin. Tergantung ukuran serta

kualitas bahan batu.

"Saya pekan lalu mengerjakan batu sekepalan tangan. Dari luar batu terlihat biasa, karena tertutup lapisan. Setelah saya belah, ternyata batu kalsedon warna putih. Dari 7 butir mata cincin yang jadi, 5 di antaranya batu combong. Sangat langka, apalagi dan 3 butir di antaranya ada kristal membentuk keris luk 3," ungkapnya sambil menambahkan, beberapa hari lalu dia juga mengerjakan batu gambar motif kuda.

Membelah batu utuh dan dalamnya ternyata ditemukan ada gambar alam dan kemudian memotong serta membentuknya menjadi mata cincin yang sesuai dengan karakter serta gambar, diperlukan keahlian dan kejelitan. Di sinilah tantangan seorang perajin batu. **(Dar)-d**

Pelepasan Sambungan hal 1

"Kami harus tahu itu spesifikasi kemampuan dari relawan, apakah dalam hal evakuasi, dapur umum, penyelamatan atau lainnya. Jadi nanti akan mudah dalam koordinasi," katanya.

Ia mengatakan, saat ini memang belum banyak kelompok relawan yang terjun membantu penanganan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah Sleman.

"Saat ini kelompok relawan yang sudah melaporkan turut turun membantu yakni dari

Dompot Dhuafa dan Aksi Cepat Tanggap (ACT), selain itu juga dari Tagana Sleman, PMI Sleman dan relawan Sleman," katanya.

Makwan mengatakan, pihaknya juga berharap kelompok relawan yang turun membantu dan membuat posko relawan untuk melapor ke BPBD Kabupaten Sleman. "Ya itu namanya 'kulanuwun' (permisi) dengan yang memiliki wilayah," katanya.

Panewu Cangkringan Suparmono mengatakan Saat ini lebih dari 200 orang warga Dusun

Kalitengah Lor, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman harus mengungsi di barak pengungsian Glagaharjo karena wilayah mereka masuk dalam zona rawan bencana erupsi Gunung Merapi karena hanya berjarak kurang dari 5 kilometer dari puncak.

Para pengungsi ini merupakan warga kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, balita, ibu hamil maupun penyandang disabilitas. **(Dev/Ant)-d**

Mujahid Sambungan hal 1

belia hingga akhir hayatnya, yang mungkin saja bisa menginspirasi para dai muda. Rektor UII Yogyakarta periode 2002-2006 Dr Ir Luthfi Hasan MS dalam kesaksiannya menyatakan, di balik sukses dakwah Sunardi Syahuri terdapat istrinya yang mampu mengembangkan bisnis keluarga. "Bisnis sukses yang dilakukan istrinya itu mampu mem-back up kegiatan dakwah suaminya secara paripurna," kata Luthfi.

Sementara Anggota DPD Ir H Cholid Mahmud MT menguraikan, dalam berdakwah

Sunardi Syahuri mengawalinya dengan *ibda' bi-nafsik*. Memulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekatnya. Kemudian merambah ke masyarakat luas, sehingga sosok Sunardi Syahuri dapat menjadi pribadi yang pantas diteladani. "Jihad dakwahnya sungguh luar biasa. Apa yang diucapkannya, itu pula yang dipraktikkan dalam kehidupannya," katanya.

Dalam buku biografi setebal 380 halaman itu, terungkap, Sunardi Syahuri bukan hanya

melakukan dakwah *bil-lisan* dan *bil-hal*. Namun, juga membangun sejumlah madrasah dan pondok pesantren, mendirikan KBIH dan biro perjalanan haji dan umrah, yang bisa dananya disumbangkan untuk biaya membangun dan operasional madrasah, ponpes, masjid dan dewan dakwah.

Pada kesempatan itu Hj Nur Lisnani Pamela mewakafkan 200 eksemplar buku biografi untuk dihadiahkan kepada para dai di Yogyakarta dan sekitarnya. **(No)-d**

Ganti Sambungan hal 1

Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, Krido Suprayitno menyatakan telah merampungkan tugasnya memasang patok *Right of Way* (RoW) berwarna merah dan putih Jalan Tol Yogya-Solo sepanjang 22 Km selama dua bulan dibarengi pembentukan tim terpadu pengadaan lahan yaitu Satgas A dan Satgas B.

Tim terpadu pengadaan lahan pembangunan jalan tol di DIY ini sudah turun di lokasi untuk melakukan inventarisasi lahan terdampak mulai dari pengukuran dan sebagainya.

"Kami minta warga terdampak di Desa Purwomartani segera menyiapkan dan melengkapi dokumen asli yang dibutuhkan yaitu dokumen asli kepemilikan alas hak dan dokumen asli turun waris. Dokumen-dokumen asli tersebut yang mempengaruhi 897 bidang itu bisa terpenuhi sebelum akhir November 2020 ini agar bisa di kompulasi dengan Satgas B tim pengadaan tanah Jalan Tol Yogya-Solo," tutur Krido kepada KR, Sabtu (14/11).

Krido menjelaskan, warga terdampak pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo sepanjang yang bisa melengkapi dokumen-dokumen asli itulah

yang bisa langsung berproses pada posisi pembayaran ganti untung.

Karena tim appraisal sudah bergerak terhadap 879 bidang di Desa Purwomartani yang terdampak tersebut. Tim ini sekaligus melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang asli warga terdampak. Pembayaran ganti untung secara bertahap bagi 3006 bidang seluas 177,5 Hektar bagi 2.978 warga terdampak pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo.

"Tim appraisal ini juga melakukan pencocokan data fisik, terutama warga terdampak yang menempuh masa sabbang atau perbaikan data selama 14 hari hingga akhir November 2020, misal ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data tertulis. Jika warga terdampak pembangunan Jalan Tol Yogya-solo di Desa Purwomartani sudah bisa dilakukan pembayaran ganti untung maka bisa disusul desa-desa terdampak lainnya," ungkap Krido.

Ia menjelaskan, pembayaran ganti untung pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo ini akan dirampungkan kepada warga terdampak di seksi

1 yaitu Desa Purwomartani, Desa Boko-harjo Desa Selomartani dan Desa Tamanmartani. Pembayaran ganti untung di seksi 1 tersebut ditargetkan selesai pertengahan tahun 2021.

"Tugas kami sebagai tim persiapan pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo sudah selesai, sekarang Satgas B yang bergerak untuk seksi 1. Kemudian Satgas A bergerak untuk seksi 2, karena bergerak paralel sesuai peraturan perundang-undangan. Harapan kami pembayaran ganti untung terhadap 897 bidang di Desa Purwomartani bisa utuh. Ini semua tergantung kesiapan warga dalam mengumpulkan dokumen asli kepemilikan atas hak dan dokumen asli turun waris," tegas Krido.

Sekda DIY, Drs K Baskara Aji mengungkapkan, pembayaran ganti untung bagi warga terdampak pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo diharapkan bisa segera dilaksanakan. Bahkan, kalau bisa dilakukan sebelum akhir tahun. Apabila hal itu bisa diwujudkan diharapkan bisa meningkatkan atau mendorong perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. **(Ira/Ria)-d**